



## Persaingan Kebijakan TPP

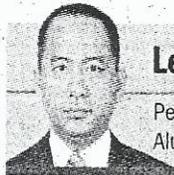
**B**ANYAK kalangan akademisi dan pembuat kebijakan menyoal isu dominan abad ke-21 akan ditentukan di Asia Pasifik. Siapa yang akan mendefinisikan aturan main di kawasan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat dilihat dari *regulatory competition* (persaingan kebijakan) yang sedang berlangsung di Asia Pasifik, khususnya Kemitraan Trans Pasifik/Trans-Pacific Partnership (TPP), dan potensi menyusun ulang geografi ekonomi politik di kawasan. Fenomena *institutional anarchy* memungkinkan adanya TPP di Asia. Institusi internasional ini berdampak pada kebijakan yang harus disikapi banyak negara di Asia Pasifik.

### Persaingan

TPP berdampak penting terhadap tatanan institusi regional Asia Timur. Hal ini bergantung pada bagaimana negosiasi dan anggotanya dapat menyelesaikan sejumlah isu sensitif yang ada. Kapasitas TPP menulis ulang aturan main yang ada bergantung juga pada lingkungan institusi di kawasan. Fakta tidak adanya institusi intraregional yang efektif mengikat negara-negara Asia Timur, khususnya tiga kekuatan negara Asia Timur Laut secara kolektif, menyebabkan TPP terwujud di kawasan Asia Pasifik.

Jika TPP secara signifikan mendefinisikan kembali geografi ekonomi politik di tengah lingkungan institusi yang terfragmentasi, di sisi lain Trans-Atlantic Trade and Investment



**Leonard F Hutabarat**

Pemerhati Masalah Internasional  
Alumnus Institut d'Etudes Politiques de Paris

Partnership (TTIP) akan mendekatkan AS dan UE lebih kohesif di Eropa.

TPP telah menghasilkan sejumlah implikasi kebijakan penting. Dengan Jepang juga menjadi anggota TPP, manfaat kawasan perdagangan bebas yang lebih besar juga menjadi lebih menarik bagi kandidat anggota baru. Lebih penting lagi, dampak TPP dalam membentuk tatanan ekonomi regional.

Pertama, kesepakatan yang ada dalam TPP sangat luas. Tidak hanya memperbarui isu tradisional dalam perjanjian perdagangan sebelumnya, tetapi juga memasukkan isu-isu perdagangan dan investasi baru, mulai dari jasa lintas batas negara, *e-commerce*, jasa keuangan, lingkungan, hak kekayaan intelektual, investasi, tenaga kerja, telekomunikasi, hingga hambatan teknis terhadap perdagangan dan isu legalistik seperti penyelesaian sengketa.

Kedua, dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi di Asia Timur, kebutuhan akan regulasi dari isu-isu tersebut juga semakin diperlukan (Kawai, 2013). Dalam kekosongan rezim ekonomi intraregional, negara-negara Asia Timur akan melihat TPP untuk aturan main guna koordinasi kebijakan ekonominya, bukan karena mereka menyukai aturannya, tetapi lebih pada aturan tersebut

mengekut mitra dagangnya, secara langsung atau tidak. Hal ini akan menimbulkan tekanan yang lebih besar bagi negara yang saat ini di luar TPP untuk bergabung. Negara-negara lainnya akan berkeinginan bergabung dengan TPP dan mengharapkan manfaat darinya (Petri, 2012).

Ketiga, dengan setengah dan mungkin masih lebih, negara-negara di kawasan bergabung dengan AS dan lainnya dalam TPP, kesepakatan yang dicapai dalam TPP akan menjadi agenda *setting* dan berfungsi sebagai regional *regulatory governance* pada masa datang. Dengan kata lain, saat aturan tersebut diimplementasikan akan menjadi tatanan ekonomi regional yang baru. Negara anggota yang telah melaksanakan aturan ini tidak akan mengubahnya dalam negosiasi perdagangan pada masa datang dengan anggota atau bahkan bukan anggota TPP. Akan sulit mengeluarkan aturan TPP dalam upaya pembangunan institusi regional selanjutnya di kawasan Asia.

### Tatanan

Dengan volume dagang yang semakin meningkat dan interdependensi antarnegara, kebutuhan akan *regulatory governance* juga akan semakin meningkat. Siapa yang akan menyusun aturan main, akan membentuk struktur

tatanan yang ada. Negara yang ingin memengaruhi norma praktik internasional, seperti AS, akan memandang institusi internasional seperti TPP, dapat menjadi salah satu instrumen yang sangat berguna. Bagi negara yang mungkin mengalami dampak negatif dengan institusi ini, bahkan lebih penting untuk memberi perhatian bagaimana memanfaatkannya atau lebih jauh lagi membangun jejaring institusi baru guna mencegah atau melakukan mitigasi terhadap potensi akibat negatifnya. Sebenarnya, bagi semua negara, institusi internasional adalah penting dan diperlukan dalam *regulatory coordination* dan kompetisi antarnegara.

Negara dalam perspektif realis menyadari hal ini. Tiongkok sekalipun, telah menghadapi dilema dengan TPP. Jika Tiongkok tidak bergabung dengan TPP, akan kehilangan manfaat dari salah satu kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia yang meliputi hampir 40% keluaran ekonomi global ini. Selain itu, juga akan kehilangan peluang untuk membentuk, dari dalam, aturan yang akan berakibat pada tatanan ekonomi regional. Di lain pihak, problematik bagi Tiongkok untuk bergabung dengan TPP. Bukan hanya karena ketidakinginan mengikuti aturan yang didominasi Barat, tetapi juga tantangan sistem ekonomi berbeda yang dianut dalam prinsip-prinsip TPP dengan *state capitalism* di Tiongkok. Opsi yang ada menjadi simalakama, bergabung dengan TPP akan menyakitkan, tetapi berada di luar

mungkin saja berdampak lebih buruk lagi.

Apa yang mungkin terjadi di kawasan? Tiongkok akan menjadi aktif dengan pengaruh lebih besar dalam menjadikan institusi intraregional yang lebih kuat. Dalam meningkatkan pengaruh globalnya, negara akan membangun koalisi dan sekutu alami Tiongkok berada di Asia.

Pembuat kebijakan akan sangat memahami dengan baik bahwa institusi internasional akan digunakan secara strategis. Negara akan membentuk institusi internasional guna mempromosikan regulasi tertentu untuk kepentingannya. Negara juga akan memanfaatkan institusi yang ada guna mencegah potensi institusi baru yang mungkin akan merugikan kepentingannya.

Literatur ekonomi dalam regionalisme cenderung berfokus pada keuntungan ekonomi, baik *trade-creating* maupun *trade-diverting*. Sedikit perhatian pada bagaimana regionalisme, sebagai institusi politik, membentuk aturan dan norma, tidak hanya dalam kawasan, tetapi juga lebih luas lagi. Pembangunan institusi regional adalah proses penting dalam menyusun ulang aturan main dan membentuk standar baru. Regionalisme tidak hanya alat untuk menghadapi potensi *trade diversion* dari blok regional lain. Regionalisme juga menjadi kendaraan dalam kompetisi untuk membentuk aturan global. Negara besar memahami benar hal ini, persaingan kebijakan tampaknya akan berlanjut lebih lagi di kawasan dan tatanan global.\*\*\*